



## ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KECURANGAN (*FRAUD*) DI SEKTOR PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Ray Rachmanta ✉ Sukardi Ikhsan

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

### Info Artikel

*Sejarah Artikel:*  
Diterima Juni 2014  
Disetujui Juli 2014  
Dipublikasikan Agustus  
2014

*Keywords:*  
*Fraud; Educational Sector.*

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh keadilan distributif, keadilan prosedural, penegakan peraturan, keefektifan sistem pengendalian internal, perilaku tidak etis, budaya organisasi, dan komitmen organisasi terhadap kecurangan. Sampel dalam penelitian ini adalah 98 pegawai dinas pendidikan kota Semarang, 52 pimpinan sekolah, 92 guru, dan 100 murid SMA Negeri se-kota Semarang. Analisis data menggunakan analisis *full model Structural Equation Modeling* (SEM) dengan alat uji *smartPLS*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis di sektor pendidikan terhadap kecurangan, terdapat pengaruh negatif antara komitmen organisasi dengan kecurangan di sektor pendidikan, terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal persepsi pegawai dinas pendidikan terhadap kecurangan. Tidak terdapat pengaruh antara keadilan distributif, keadilan prosedural, penegakan peraturan, dan budaya organisasi dengan kecurangan di sektor pendidikan, tidak terdapat pengaruh antara keefektifan sistem pengendalian internal persepsi pimpinan sekolah, guru, dan murid dengan kecurangan.

### Abstract

*The purpose of the research were the effect justice distributif, justice procedural, regulatory enforcement, the effectiveness of the internal control system, the behavior unethical, organizational culture, and organizational commitment toward fraud. The sample of this research is 98 employed in the education service officers, 52 employed in schools, 92 teachers, and 100 students of SMA Negeri Semarang. The data analysis in this study used the Structural Equation model analysis of the full Modeling (SEM) with test equipment smartPLS. The results showed that there was a positive influence of unethical behavior with fraud in the educational sector, there was a negative influence of organizational commitment with fraud in the education sector, there was a negative influence of the effectiveness of internal control systems by fraud the perception of employees of the Department of education, there was no influence between procedural justice distributif, justice, enforcement of regulations, and cultural organizations with fraud in the education sector, there was no influence between the effectiveness of the internal control system of the perception of the direction of the school, teachers, and students by fraud.*

© 2014 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:  
Gedung C6 Lantai 2 FE Unnes  
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229  
E-mail: rachmanta12@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran vital dalam pertumbuhan suatu negara. Pendidikan juga menjadi salah satu tolok ukur maju tidaknya suatu negara dan membentuk generasi yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Untuk menciptakan hal tersebut haruslah memiliki sistem pendidikan yang baik, sehingga akan meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan itu sendiri.

UUD 1945 menuangkan Undang-Undang tentang pendidikan dalam UU No. 20, Tahun 2003, Pasal 3 yang menyebutkan, "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan dituangkan pasal tersebut, Indonesia seharusnya menerapkan pendidikan yang bermutu, berkarakter dan taat pada peraturan. Apabila negara kita benar-benar menerapkannya, niscaya akan terhindar dari tindakan yang merugikan berbagai pihak seperti kecurangan (*fraud*) sehingga terbentuk bangsa yang kuat dan mampu bersaing.

ICW mengungkapkan, telah terjadi 296 korupsi pendidikan dengan tersangka sebanyak 479 orang hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 619 miliar dalam 10 tahun (www.rmol.co). Dugaan kasus korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang. Ada 16 kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Kota Semarang yang menjalani pemeriksaan awal petugas Unit III Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal. Kasus yang terjadi berupa proposal yang diduga fiktif dengan indikasi ada pencairan dana namun tidak ada bentuk fisiknya dan diduga terjadi penyimpangan dana BOS di tingkat SD dengan menggunakan modus menggelembungkan harga buku latihan soal-soal Ujian Nasional (UN).

Tindakan sejumlah oknum UPT yang *me-mark up* harga buku yang mencapai 300 persen itu bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 76 Tahun 2012 (www.jatengtime.com). Berdasarkan data dari Kemdikbud, aduan terkait kecurangan UN pada tahun 2012 mencapai 258 aduan dan aduan kebocoran mencapai 85 aduan. Pada tahun 2013, aduan untuk kecurangan UN dan kebocoran mengalami penurunan drastis yaitu masing-masing hanya 13 aduan dan 6 aduan ([edukasi.kompas.com](http://edukasi.kompas.com)). Tingkat penurunan kecurangan yang signifikan ini merupakan kemajuan yang sangat baik. Akan tetapi masih perlu diminimalisir lagi atau bahkan dihilangkan.

Pada umumnya *fraud* terjadi karena tiga hal yang mendasarinya terjadi secara bersama, hal ini disebutkan dalam *fraud triangle theory* oleh Cressey (1953) yaitu, *Pressure*, *Opportunity*, dan *Rationalization*. *Pressure* atau tekanan dapat terjadi dari dalam organisasi maupun kehidupan individu. *Pressure* diprosikan menjadi keadilan distributif dan keadilan prosedural. *Opportunity* atau kesempatan terjadi bila aturan dan sistem pengendalian dalam organisasi kurang efektif. *Opportunity* diprosikan menjadi lain penegakan peraturan dan keefektifan sistem pengendalian internal. *Rationalization* terjadi karena seseorang mencari pembenaran atas aktifitasnya yang mengandung *fraud*. *Rationalization* diprosikan menjadi perilaku tidak etis, budaya organisasi, dan komitmen organisasi.

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*) memiliki hasil yang cukup bervariasi. Penelitian Wilopo (2006) menyatakan bahwa ketaatan aturan akuntansi, pengendalian internal, dan perilaku tidak etis berpengaruh terhadap kecurangan sedangkan kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecurangan, penelitian Wilopo (2008) menyatakan bahwa pengendalian internal dan perilaku tidak etis birokrasi pemerintahan secara parsial tidak memberikan pengaruh terhadap kecurangan (*fraud*) tetapi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kecurangan (*fraud*), hasil penelitian Pristiyanti (2012)

menunjukkan bahwa keadilan distributif dan keadilan prosedural tidak berpengaruh terhadap kecurangan, sementara sistem pengendalian internal, kepatuhan pengendalian internal, budaya etis organisasi, dan komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecurangan., dan Penelitian Zulkarnain (2013) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian intern, kesesuaian kompensasi, dan gaya kepemimpinan terhadap *fraud*, terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis terhadap *fraud*, dan tidak terdapat pengaruh antara kultur organisasi dan penegakan hukum terhadap *fraud*.

Adanya *Fenomena gap* dan *Research gap* pada penelitian tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali. Peneliti melakukan penelitian di kota Semarang dengan responden pegawai dinas pendidikan, pimpinan sekolah, guru, dan murid SMA Negeri.

#### **Pengaruh Keadilan Distributif terhadap Kecurangan (*Fraud*)**

Teori kewajaran (*equity theory*) mengatakan bahwa manusia dalam hubungan-hubungan sosial mereka, berkeyakinan bahwa imbalan-imbalan organisasional harus didistribusikan sesuai dengan tingkat kontribusi individual (Cowherd dan Levine, 1992 dalam Mariani, 2012). Imbalan yang dimaksud dapat berupa pemberian gaji, insentif, maupun tunjangan yang sesuai dengan jasa masing-masing pegawai. Dengan demikian, pegawai akan merasa di apresiasi oleh atasan melalui pemberian kompensasi tersebut. Dari uraian tersebut hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1 :Keadilan Distributif berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi pegawai dinas pendidikan.

H8 :Keadilan Distributif berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi pimpinan sekolah SMA Negeri se-kota Semarang.

H15:Keadilan Distributif berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi guru SMA Negeri se-kota Semarang.

H22:Keadilan Distributif berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi murid SMA Negeri se-kota Semarang.

#### **Pengaruh Keadilan Prosedural terhadap Kecurangan (*Fraud*)**

Individu-individu dalam organisasi akan mempersepsikan adanya keadilan prosedural, ketika aturan - aturan prosedural yang ada dalam organisasi dipenuhi oleh para pengambil kebijakan. Sebaliknya, apabila aturan – aturan prosedural tersebut dilanggar, individu dalam organisasi akan mempersepsikan adanya ketidakadilan (Mariani, 2012). Dengan demikian prosedur pengambilan keputusan harus dilaksanakan secara adil demi terciptanya sinergi antara atasan dengan bawahan. Dari uraian tersebut hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2 :Keadilan Prosedural berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi pegawai dinas pendidikan.

H9 :Keadilan Prosedural berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi pimpinan sekolah SMA Negeri se-kota Semarang.

H16:Keadilan Prosedural berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi guru SMA Negeri se-kota Semarang.

H23:Keadilan Prosedural berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi murid SMA Negeri se-kota Semarang.

#### **Pengaruh Penegakan Peraturan terhadap Kecurangan (*Fraud*)**

Penegakan peraturan/hukum adalah suatu proses atau upaya ditegakkannya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan. Semua kegiatan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk meminimalisir pelanggaran atas peraturan yang berlaku, maka harus ada penegakan peraturan yang tegas dalam lingkungan organisasi tersebut. Dari uraian tersebut hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

- H3 :Penegakan Peraturan berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi pegawai dinas pendidikan.
- H10: Penegakan Peraturan berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi pimpinan sekolah SMA Negeri se-kota Semarang.
- H17:Penegakan Peraturan berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi guru SMA Negeri se-kota Semarang.
- H24: Penegakan Peraturan berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi murid SMA Negeri se-kota Semarang.

#### **Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kecurangan (*Fraud*)**

Di dalam Wilopo (2006), AICPA mengatakan bahwa adanya suatu sistem pengendalian internal bagi sebuah organisasi sangatlah penting, antara lain untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan. Selain itu pengendalian internal juga merupakan alat pengendalian dari berbagai kegiatan perusahaan yang harus ditaati dan dijalankan oleh setiap unit organisasi. (IAI, 2001:319). Dari uraian tersebut hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

- H4 :Keefektifan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi pegawai dinas pendidikan.
- H11:Keefektifan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi pimpinan sekolah SMA Negeri se-kota Semarang.
- H18:Keefektifan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi guru SMA Negeri se-kota Semarang.
- H25:Keefektifan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi murid SMA Negeri se-kota Semarang.

#### **Pengaruh Perilaku Tidak Etis terhadap Kecurangan (*Fraud*)**

Pentingnya perilaku etis pada organisasi sudah semakin nyata, karena banyak penelitian

terbaru sudah menghasilkan pengetahuan yang terkait dengan manajemen, khususnya perilaku etis individu di dalam organisasi (Trevino, Weaver, dan Reynolds, 2006). Tindakan kecurangan (*fraud*) yang terjadi di sektor pendidikan disebabkan oleh perilaku tidak etis yang dilakukan oleh manajemennya sendiri. Perilaku tidak etis yang biasa dilakukan oleh manajemen diantaranya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, penyalahgunaan sumber daya dan penipuan. Sehingga dapat diasumsikan bahwa perilaku tidak etis yang tinggi akan mempengaruhi pegawai dinas pendidikan, pimpinan sekolah, guru, dan murid dalam melakukan tindak kecurangan. Dari uraian tersebut hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

- H5 :Perilaku Tidak Etis berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi pegawai dinas pendidikan.
- H12:Perilaku Tidak Etis berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi pimpinan sekolah SMA Negeri se-kota Semarang.
- H19:Perilaku Tidak Etis berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi guru SMA Negeri se-kota Semarang.
- H26:Perilaku Tidak Etis berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi murid SMA Negeri se-kota Semarang.

#### **Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kecurangan (*Fraud*)**

Menurut Luthans (2006:47) budaya dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh untuk menginterpretasikan pengalaman dan menghasilkan perilaku sosial. Etis atau tidaknya budaya suatu organisasi akan berpengaruh terhadap kecurangan. Semakin etis budaya organisasi akan menekan tindakan kecurangan di dalam suatu organisasi begitupun sebaliknya. Dari uraian tersebut hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

- H6 :Budaya Organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi pegawai dinas pendidikan.
- H13:Budaya Organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi

pimpinan sekolah SMA Negeri se-kota Semarang.

H20: Budaya Organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi guru SMA Negeri se-kota Semarang.

H27: Budaya Organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi murid SMA Negeri se-kota Semarang.

### Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kecurangan (*Fraud*)

Komitmen organisasi dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Oleh karena itu, komitmen organisasi akan menimbulkan rasa ikut memiliki (*sense of belonging*) bagi pekerja terhadap organisasi. Jika pekerja merasa jiwanya terikat dengan nilai-nilai organisasional yang ada maka dia akan merasa senang dalam bekerja, sehingga kinerjanya dapat meningkat (Yuskar dan Devisia, 2011). Dari uraian tersebut hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut.

H7 :Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi pegawai dinas pendidikan.

H14:Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi pimpinan sekolah SMA Negeri se-kota Semarang.

H21:Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi guru SMA Negeri se-kota Semarang.

H28:Komitmen Organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) persepsi murid SMA Negeri se-kota Semarang.

## METODE

### Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dinas pendidikan kota Semarang, pimpinan sekolah, guru, dan murid SMA Negeri se-kota Semarang. Teknik penentuan sampel dengan menggunakan teknik *convenience sampling*.

**Tabel 1.** Jumlah Sampel yang Diperoleh

	Responden	Jumlah
1	Pegawai Pendidikan	98
2	Pimpinan Sekolah	52
3	Guru	92
4	Murid	100

### Variabel Penelitian

**Tabel 2.** Definisi Operational Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Pengukuran
(Y) Kecurangan ( <i>Fraud</i> )	Indikator yang dibangun sendiri dan adaptasi dari wilopo (2006) dan Pristiyaniti (2012)	Skala Likert
(X1) Keadilan Distributif	dikembangkan dari penelitian Colquitt (2001)	Skala Likert
(X2) Keadilan Prosedural	Indikator dikembangkan dari penelitian Colquitt (2001)	Skala Likert
(X3) Penegakan Peraturan	Adaptasi UUD 1945 PP No. 58 tahun 2005	Skala Likert
(X4) Keefektifan Sistem Pengendalian Internal	Indikator dikembangkan dari Wilopo (2008)	Skala Likert
(X5) Perilaku Tidak Etis	Indikator dikembangkan dari Wilopo (2006)	Skala Likert
(X6) Budaya Organisasi	Indikator dikembangkan dari Robbins (2008)	Skala Likert
(X7) Komitmen Organisasi	Indikator dikembangkan dari Luthans (2006)	Skala Likert

### Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode penyebaran angket atau

kuesioner. Dalam penelitian ini, jawaban dan data responden dijamin kerahasiaannya. Pengukuran jawaban responden dinilai dengan skala likert antara 1 – 5. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

instrumen adaptasi dan instrumen yang dibangun sendiri item pertanyaannya berdasarkan hasil pengembangan penelitian terdahulu. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan *Partial Least Square (PLS)*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Statistik Deskriptif

Tabel 3. Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
FR*	98	5.00	16.00	886.00	9.0408	2.95645
FR**	52	5.00	19.00	474.00	9.1154	3.38772
FR***	92	5.00	19.00	876.00	9.5217	3.12198
FR****	100	5.00	19.00	941.00	9.4100	3.09478
KD*	98	10.00	25.00	1931.00	19.7041	2.81824
KD**	52	9.00	23.00	963.00	18.5192	2.78293
KD***	92	9.00	25.00	1719.00	18.6848	2.60148
KD****	100	9.00	25.00	1880.00	18.8000	2.77798
FR*	98	5.00	16.00	886.00	9.0408	2.95645
FR**	52	5.00	19.00	474.00	9.1154	3.38772
FR***	92	5.00	19.00	876.00	9.5217	3.12198
FR****	100	5.00	19.00	941.00	9.4100	3.09478
KP*	98	12.00	25.00	2123.00	21.6633	2.40679
KP**	52	16.00	25.00	1134.00	21.8077	2.16060
KP***	92	12.00	25.00	1959.00	21.2935	2.58711
KP****	100	12.00	25.00	2142.00	21.4200	2.56700
PP*	98	10.00	25.00	1919.00	19.5816	2.76548
PP**	52	10.00	25.00	1037.00	19.9423	3.94776
PP***	92	10.00	25.00	1838.00	19.9783	3.35444
PP****	100	10.00	25.00	1986.00	19.8600	3.39643
SPI*	98	10.00	25.00	1958.00	19.9796	3.51427
SPI**	52	10.00	24.00	987.00	18.9808	3.05178
SPI***	92	10.00	24.00	1760.00	19.1304	2.71025
SPI****	100	10.00	24.00	1930.00	19.3000	2.70241
PTE*	98	5.00	20.00	1063.00	10.8469	2.92290
PTE**	52	6.00	21.00	693.00	13.3269	4.28733
PTE***	92	5.00	23.00	1259.00	13.6848	4.20604
PTE****	100	5.00	23.00	1408.00	14.0800	4.35200
BO*	98	6.00	24.00	1822.00	18.5918	3.08250
BO**	52	6.00	23.00	964.00	18.5385	3.32820

	N	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation
FR*	98	5.00	16.00	886.00	9.0408	2.95645
FR**	52	5.00	19.00	474.00	9.1154	3.38772
FR***	92	5.00	19.00	876.00	9.5217	3.12198
BO***	92	6.00	24.00	1705.00	18.5326	2.99616
BO****	100	6.00	24.00	1867.00	18.6700	3.02199
KO*	98	10.00	25.00	1977.00	20.1735	2.79552
KO**	52	12.00	25.00	1032.00	19.8462	2.93314
KO***	92	12.00	25.00	1831.00	19.9022	2.76977
KO****	100	12.00	25.00	1998.00	19.9800	2.81044

Keterangan : \* Pegawai Dinas Pendidikan

\*\*Pimpinan sekolah

\*\*\* Guru

\*\*\*\* Murid

Berdasarkan Tabel 3 standar deviasi pada semua variabel lebih kecil dari nilai *mean*, maka kecenderungan penentuan kategori semua variabel dilihat berdasarkan nilai *mean*. Hasil tersebut kemudian disesuaikan dengan tabel kategori, sehingga variabel kecurangan termasuk dalam kategori sangat jarang terjadi, variabel keadilan distributif termasuk dalam kategori cukup adil, variabel keadilan prosedural termasuk dalam kategori adil, variabel penegakan peraturan termasuk dalam kategori cukup ditegakkan, variabel keefektifan sistem pengendalian internal termasuk dalam kategori cukup efektif, variabel perilaku tidak etis pada pegawai dinas pendidikan termasuk dalam kategori sangat etis sedangkan pada pimpinan sekolah, guru, dan murid termasuk dalam kategori etis, variabel budaya organisasi termasuk dalam kategori cukup berbudaya, dan variabel komitmen organisasi termasuk dalam kategori cukup berkomitmen.

## UJI INNER MODEL

### Uji Goodness fit-Model

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa R-Square pada pegawai dinas pendidikan, pimpinan sekolah, guru, dan murid berturut-turut 0,568; 0,630; 0,552; dan 546 yang berarti bahwa variabilitas konstruk *fraud* di sektor pendidikan pada pegawai dinas pendidikan, pimpinan sekolah, guru, dan murid yang dapat dijelaskan oleh variabilitas konstruk Keadilan Distributif (KD), Keadilan Prosedural (KP), Perilaku Tidak Etis (PTE), Penegakan Peraturan (PP), Keefektifan Sistem Pengendalian Internal (SPI), Budaya Organisasi (BO), dan Komitmen Organisasi (KO) masing - masing sebesar 56,8%; 63%; 55,2%; 54,6%; sedangkan 43,2%; 37%; 44,8%; dan 45,4% dijelaskan oleh variabel lain di luar yang diteliti.

**Pengujian Hipotesis****Tabel 4.** *Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values)*

	Original Sample (O)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STERR )	Keputusan
KD -> <i>Fraud</i>	0,070136	0,106561	0,658174	H1 ditolak
KP -> <i>Fraud</i>	-0,190899	0,125856	1,516808	H2 ditolak
PP -> <i>Fraud</i>	-0,076056	0,109641	0,693689	H3 ditolak
SPI -> <i>Fraud</i>	-0,209223	0,072916	2,869357	H4 diterima
PTE -> <i>Fraud</i>	0,311148	0,100833	3,085773	H5 diterima
BO -> <i>Fraud</i>	-0,034207	0,183833	0,186078	H6 ditolak
KO -> <i>Fraud</i>	-0,252362	0,120389	2,096218	H7 diterima
KD -> <i>Fraud</i>	-0,024640	0,165654	0,148745	H8 ditolak
KP -> <i>Fraud</i>	0,036658	0,170630	0,214840	H9 ditolak
PP -> <i>Fraud</i>	-0,036549	0,103801	0,352102	H10 ditolak
SPI -> <i>Fraud</i>	0,013860	0,135882	0,101998	H11 ditolak
PTE -> <i>Fraud</i>	0,282607	0,125709	2,248108	H12 diterima
BO -> <i>Fraud</i>	-0,083794	0,154915	0,540904	H13 ditolak
KO -> <i>Fraud</i>	-0,584510	0,161224	3,625464	H14 diterima
KD -> <i>Fraud</i>	0,101857	0,127097	0,801415	H15 ditolak
KP -> <i>Fraud</i>	-0,190595	0,129532	1,471417	H16 ditolak
PP -> <i>Fraud</i>	-0,114992	0,066921	1,718309	H17 ditolak
SPI -> <i>Fraud</i>	-0,084801	0,104290	0,813130	H18 ditolak
PTE -> <i>Fraud</i>	0,215625	0,082049	2,627985	H19 diterima
BO -> <i>Fraud</i>	-0,023222	0,124953	0,185847	H20 ditolak
KO -> <i>Fraud</i>	-0,417727	0,114480	3,648919	H21 diterima
KD -> <i>Fraud</i>	0,159321	0,134364	1,185739	H22 ditolak
KP -> <i>Fraud</i>	-0,215767	0,123320	1,749646	H23 ditolak
PP -> <i>Fraud</i>	-0,095182	0,071381	1,333434	H24 ditolak
SPI -> <i>Fraud</i>	-0,131026	0,094235	1,390414	H25 ditolak
PTE -> <i>Fraud</i>	0,154824	0,077172	2,006215	H26 diterima
BO -> <i>Fraud</i>	-0,025748	0,132904	0,193733	H27 ditolak
KO -> <i>Fraud</i>	-0,447598	0,108727	4,116721	H28 diterima

**Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 1,8,15, dan 22**

Penelitian ini menyatakan bahwa meskipun keadilan distributif sudah adil tidak dapat menjamin kecurangan (*fraud*) tidak terjadi. Sistem penggajian pada pemerintahan belum mempertimbangkan tupoksi dengan kompensasi yang diberikan kepada pegawai dinas pendidikan, pimpinan sekolah, dan guru, sehingga mereka merasa bahwa tupoksi yang diberikan sangat berat tidak sebanding dengan kompensasi yang didapatkan. Pada penilaian murid, sekolah belum memberikan sistem penilaian yang menguntungkan bagi murid

sehingga diperlukan koreksi agar mereka merasa bahwa nilai yang didapatkan merupakan penilaian yang adil. Disisi lain persepsi pegawai dinas pendidikan, pimpinan sekolah, dan guru hal tersebut disebabkan oleh faktor keserakahan yang dimiliki oleh seorang individu. (Bologna, dalam 1993 Soepardi, 2010) mengatakan bahwa salah satu penyebab *fraud*/kecurangan adalah *greed*/keserakahan. Keserakahan akan menuntut individu untuk memenuhi kebutuhan melebihi apa yang dibutuhkan dan keserakahannya sendiri yang ingin hidup melebihi gaya hidup yang seharusnya. Sedangkan persepsi murid terhadap hasil penelitian ini disebabkan oleh faktor

*habit*/kebiasaan yang ada pada diri seorang murid. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pristiyanti (2012) tetapi tidak sejalan dengan penelitian Zulkarnain (2013) dan Wilopo (2006).

#### **Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 2,9,16, dan 23**

Penelitian ini menyatakan bahwa meskipun keadilan prosedural sudah adil tidak dapat menjamin kecurangan (*fraud*) tidak terjadi. Wilopo (2006) menjelaskan bahwa hal ini disebabkan karena di Indonesia baik bagi perusahaan maupun pemerintahan (termasuk dinas pendidikan dan sekolah negeri) tidak ada sistem kompensasi yang mendeskripsikan secara jelas hak dan kewajiban, ukuran prestasi dan kegagalan, dalam mengelola organisasi serta ganjaran dan pinalti yang dapat menghindarkan organisasi dari kecenderungan kecurangan akuntansi. Prosedur dan sistem penilaian pada sekolah negeri masih tergantung dari guru yang mengajarnya belum diatur secara jelas dan serentak oleh sekolah. Hal ini menyebabkan murid memiliki persepsi yang berbeda-beda dengan prosedur dan sistem penilaian masing-masing guru. Disisi lain menurut persepsi pegawai dinas pendidikan, pimpinan sekolah, guru dan murid hal tersebut disebabkan oleh faktor perbedaan kepentingan dalam diri individu. Tjahjono (2010) dalam Pristiyanti (2012) menjelaskan bahwa setiap individu menginginkan kepentingannya dapat diakomodasikan dengan prosedur, padahal kepentingan-kepentingan tersebut seringkali berbeda satu dengan lainnya dan tidak jarang saling bertentangan. Perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan individu merasa kepentingan mereka belum diwujudkan dengan adanya prosedur penggajian dan pemberian kompensasi lainnya (pegawai dinas pendidikan, pimpinan sekolah, dan guru) atau sistem penilaian (murid). Sehingga mereka merasa prosedur/sistem tersebut belum mengekspresikan pandangan dan perasaan sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pristiyanti (2012).

#### **Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 3,10,17, dan 24**

Penelitian ini menyatakan bahwa meskipun penegakan peraturan sudah ditegakkan tidak dapat menjamin kecurangan (*fraud*) tidak terjadi. Pada dinas pendidikan dan sekolah negeri kota Semarang penegakan peraturan tidak ditegakkan secara tegas dan pemberian sanksi kepada pelaku tidak sebanding dengan beratnya pelanggaran yang dilakukan sehingga menyebabkan oknum pegawai dinas pendidikan, pimpinan sekolah, dan guru dengan mudah melanggar peraturan yang berlaku tanpa takut akan sanksi yang akan di dapatkan. Penegakan peraturan yang diberlakukan pada murid di sekolah juga termasuk dalam kategori cukup ditegakkan sehingga cukup memudahkan para murid melakukan pelanggaran tata tertib sekolah tanpa menghiraukan sanksi yang akan didapatkan karena guru BP kurang tanggap dalam penanganan pelanggaran tata tertib sekolah yang dilakukan oleh murid. Disisi lain menurut Koentjaraningrat (2008:46) manusia memiliki mentalitas yang bernafsu untuk mencapai tujuannya secepat-cepatnya tanpa banyak kerelaan berusaha dari permukaan secara langkah demi selangkah. Hal ini dapat diartikan bahwa manusia ingin sesuatu yang serba instan tanpa melalui proses yang sulit, sehingga mereka akan memiliki *attitude* atau sikap tidak disiplin dimana akan menimbulkan persepsi bahwa wajar apabila sesuatu dicapai meskipun harus melanggar aturan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Zulkarnain (2013).

#### **Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 4,11,18, dan 25**

Penelitian ini menyatakan bahwa sistem pengendalian intenal yang efektif akan mengurangi tindakan kecurangan (*fraud*) persepsi pegawai dinas pendidikan kota Semarang. Dinas Pendidikan kota Semarang memiliki lingkungan pengendalian, sistem informasi, dan komunikasi yang baik, dan aktivitas pengendalian yang cukup efektif. Selain itu instansi ini memiliki integritas dan menaati nilai etika, pimpinan dan pegawai yang memiliki komitmen, keteladanan seorang pemimpin, dan ketersediaan

infrastruktur berupa pedoman, kebijakan, dan prosedur yang terintegrasi dengan unsur - unsur lainnya. Teori *fraud triangle* mengatakan bahwa terdapat faktor *opportunities* (kesempatan) yang menyatakan bahwa kecurangan akan terjadi jika ada kesempatan. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa jika sistem pengendalian internal memiliki kelemahan maka kecenderungan individu untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) akan semakin meningkat. Dengan kata lain, semakin efektif sistem pengendalian internal suatu organisasi maka akan menekan kecenderungan kecurangan (*fraud*) persepsi pegawai dinas pendidikan di sektor pendidikan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wilopo (2006), Pristiyanti (2012), dan Zulkarnain (2013).

Penelitian ini menyatakan bahwa meskipun sistem pengendalian sudah efektif tidak dapat menjamin kecurangan (*fraud*) tidak terjadi persepsi pimpinan sekolah, guru, dan murid. Keefektifan sistem pengendalian internal di SMA Negeri se-kota Semarang memiliki sistem pengendalian internal yang kurang efektif contohnya sistem absensi guru dan murid serta pembagian kewenangan yang kurang jelas pada pimpinan sekolah sehingga tidak menutup kemungkinan memberikan ruang pada pimpinan sekolah, guru, dan murid untuk menerabas sistem pengendalian yang kurang efektif tersebut. Disisi lain terdapat dua faktor yang menyebabkan pimpinan sekolah, guru, dan murid tetap melakukan tindak kecurangan meskipun sistem pengendalian internal cukup efektif. Faktor tersebut yaitu pertama, individu yang memiliki sifat tidak malu melakukan kecurangan. Menurut Hasibuan (2002:166) Materialitas telah membuat individu berbuat apa saja demi harta tanpa rasa malu. Faktor yang kedua adalah, lingkungan sekitar yang apatis terhadap pelaku kecurangan sehingga memudahkan pelaku untuk melakukan tindakan kecurangan. Sujarwa (2005:115) menyatakan bahwa kesadaran moral merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan setiap orang karena apabila ketidaksadaran ada pada diri seseorang dapat membuat kepincangan dalam hidup. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wilopo (2008).

#### **Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 5,12,19, dan 26**

Penelitian ini menyatakan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif dengan kecurangan (*fraud*). Hal tersebut dikarenakan, adanya rasa saling menghargai antar sesama sehingga mereka lebih mengedepankan perilaku yang baik dan benar. Mereka dapat berbuat adil dan jujur dalam konteks hubungan dalam organisasional dan tidak terdapat konflik kepentingan yang terjadi dalam instansi-instansi tersebut. Sehingga dapat menekan perilaku tidak etis dalam melaksanakan aktivitas masing-masing. Penelitian ini mendukung teori *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Cressey (1950) yang menyatakan bahwa rasionalisasi / *Rationalization* (dalam hal ini diprosikan dengan perilaku tidak etis) menjadi elemen yang penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran setelah melakukan kejahatan melainkan sebelum melakukan tindakan tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Wilopo (2006) dan Zulkarnain (2013).

#### **Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 6,13,20, dan 27**

Penelitian ini menyatakan bahwa meskipun budaya organisasi sudah etis tidak dapat menjamin kecurangan (*fraud*). Sektor pendidikan di kota Semarang termasuk dalam kategori cukup berbudaya. Meskipun cukup berbudaya tidak menjamin tindakan kecurangan tidak terjadi di sektor ini. Menurut Warren, Ruddick dkk (1999) dalam Setriasno, Bambang dkk (2009) diperlukan perkembangan organisasi (*organizational development*) dalam suatu organisasi modern. Dengan adanya modal sosial tersebut akan terjalin komunikasi dan perilaku yang baik antar individu sehingga akan meningkatkan budaya organisasi yang baik pula. Akan tetapi bila modal sosial tersebut tidak diterapkan dengan baik maka budaya organisasi akan mengalami ketimpangan karena berbagai faktor. Disisi lain menurut Bologna (1993) dalam Soepardi (2010) terdapat dua faktor yang dapat mempengaruhi seorang individu dalam berperilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari diri seorang

individu seperti, pengalaman, perasaan, kemampuan berpikir, kerangka acuan, dan motivasi, sedangkan faktor eksternal berasal dari rangsangan atau faktor lingkungan. Pengaruh terbesar dalam melakukan tindakan kecurangan dari kedua faktor tersebut adalah faktor internal yang berasal dari dalam diri individu. Hal ini dikarenakan individu yang memiliki sifat egois, serakah, dan ingin hidup mewah akan mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan lain untuk memiliki sesuatu yang lebih tanpa mempedulikan budaya organisasi yang etis dan menganggap wajar atas kecurangan yang dilakukannya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Zulkarnain (2013) tetapi tidak sejalan dengan penelitian Pristiyanti (2012).

#### **Pembahasan Hasil Pengujian Hipotesis 7,14,21, dan 28**

Penelitian ini menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif dengan kecurangan (*fraud*). Menurut Indriani (2013) seorang individu dengan standar moral yang lebih tinggi, mungkin tidak begitu mudah untuk merasionalisasi tindakannya berbuat curang, sedangkan seseorang yang umumnya memiliki sifat yang tidak jujur, mungkin lebih mudah untuk merasionalisasi penipuan atau kecurangan yang dilakukannya. Penelitian ini mendukung teori *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Cressey (1950) yang menyatakan bahwa rasionalisasi /*rationalization* (dalam hal ini diproksikan dengan komitmen organisasi) menjadi elemen yang penting dalam terjadinya *fraud*, dimana pelaku mencari pembenaran setelah melakukan kejahatan melainkan sebelum melakukan tindakan tersebut. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Pristiyanti (2012).

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara keadilan distributif, keadilan prosedural, penegakan peraturan, dan budaya organisasi dengan kecurangan (*fraud*) persepsi pegawai dinas pendidikan, pimpinan sekolah, guru, dan murid di sektor pendidikan di

kota Semarang, sehingga. Tidak terdapat pengaruh antara keefektifan sistem pengendalian internal dengan kecurangan (*fraud*) persepsi pimpinan sekolah, guru, dan murid di sektor pendidikan di kota Semarang, sementara terdapat pengaruh negatif antara keefektifan sistem pengendalian internal dengan kecurangan (*fraud*) persepsi pegawai dinas pendidikan di sektor pendidikan di kota Semarang. Terdapat pengaruh positif antara perilaku tidak etis dengan kecurangan (*fraud*) persepsi pegawai dinas pendidikan, pimpinan sekolah, guru, dan murid di sektor pendidikan di kota Semarang. Terdapat pengaruh negatif antara komitmen organisasi dengan kecurangan (*fraud*) persepsi pegawai dinas pendidikan, pimpinan sekolah, guru, dan murid di sektor pendidikan di kota Semarang.

Saran dari penelitian ini bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkombinasikan metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif sehingga lebih akurat karena metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini masih terbatas hanya menyajikan kuesioner sehingga belum dapat mengukur kecurangan yang terjadi di dalam sektor pendidikan karena jawaban responden berdasarkan persepsi yang seharusnya terjadi bukan yang sebenarnya terjadi.

#### **REFERENSI**

- Colquitt, Jason A. 2001. On the dimensionality of organizational justice: a construct validation of measure. *Journal of Applied Psychology*: 86(3): 386-400.
- Hasibuan, Sofia Rangkuti. 2002. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Teori dan Konsep*. Jakarta : Dian Rakyat
- <http://edukasi.kompas.com/read/2013/04/26/10245591/Kemendikbud.Berkurang..Kecurangan.dan.Kebocoran.Soal.Tahun.Ini/Diakses.pada.tanggal.10.Oktober.2013.Pukul.19.00>
- <http://www.jatengtime.com/2013/hukrim/terkait-dugaan-korupsi-dana-bos-sejumlah-uptd-tendidikan-kota-semarang-diperiksa-poltabs/#.U1bGMxDW-dA>. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2013. Pukul 19.00

- <http://www.rmol.co/read/2013/08/29/123621/Anggaran-Pendidikan-Jadi-Sasaran-Empuk-Koruptor->. Diakses pada tanggal 10 Oktober 2013. Pukul 19.00
- Indriani, Retno. 2013. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kecurangan (Fraud) Persepsi Pegawai Dinas Kabupaten Rembang. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES.
- Koentjaraningrat. 2008. Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Luthans, Fred. 2006. Organizational Behavior. New York : Mc Graw-Hill.
- Mariani. 2012. Anteseden Dan Moderasi Kualitas Pengendalian Internal Terhadap Hubungan Antara Keadilan Organisasi Dan Kinerja Karyawan. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNDIP.
- Pristiyanti, Ika Ruly. 2012. Persepsi Pegawai Instansi Pemerintah Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fraud di Sektor Pemerintahan. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES.
- Robbins, Stephen P dan Judge, Timothy A. 2008. Perilaku Organisasi Organizational Behavior. Jakarta : Salemba Empat.
- Setiarso, Bambang dkk. 2009. Penerapan Knowledge Management pada Organisasi. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Soepardi, Edi Mulyadi. 2010. Peran BPKP dalam Penanganan Kasus Berindikasi Korupsi Pengadaan Jsa Konsultasi Instansi Pemerintah. Jakarta : BPKP.
- Sujarwa. 2005. Manusia dan Fenomena Budaya. Cetakan Ketiga. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Thoyibatun, Siti. 2009. Analysing The Influence Of Internal Control Compliance And Compensation System Against Unethical Behavior And Accounting Fraud Tendency (Studies at State University in East Java. Palembang : Simposium Nasional Akuntansi XII.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. PP No. 58 tahun 2005 tentang Keuangan Daerah.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Fungsi dan Tujuan Pendidikan.
- Valentine, Sean et al. 2002. Ethical context, organizational commitment, and person-organization fit. Journal of Business Ethics. Vol. 41 No. 4, pp. 349-61.
- Wilopo. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. Padang: Simposium Nasional Akuntansi IX.
- Wilopo. 2008. Pengaruh Pengendalian Internal Birokrasi Pemerintah dan Pelaku Tidak Etis Birokrasi terhadap Kecurangan Akuntansi Di Pemerintah Persepsi Auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Jurnal Ventura Volume p11 no. 1 April 2008.
- Yuskar dan Selly Devisia. 2011. Pengaruh Independensi Auditor, Komitmen Organisasi, Pemahaman Good Governance, Integritas Auditor, Budaya Organisasi, dan Etos Kerja Terhadap Kinerja Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik Big Four yang Berafiliasi di Indonesia Tahun 2011). Simposium Nasional Akuntansi 14 Aceh 2011.
- Zulkarnain, Rifqi Mirza. 2013. Analisis Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Fraud pada Dinas Kota Surakarta. Skripsi. Semarang : Fakultas Ekonomi UNNES.